EPILOG

Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, MS.

Lima tulisan yang tersaji dalam buku bunga rampai ini memfokuskan pembahasan pada upanya pemberdayaan kewirausahaan UKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, dan tentu saja perekonomian nasional. Buku ini menyampaikan pesan bahwa pengembangan UKM dapat menjadi sarana untuk penciptaan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, terdapat urgensi untuk percepatan pengembangan UKM dari sisi kuantitas dan kualitasnya.

Dari buku ini diperoleh informasi bahwa pemerintah dan pemda sudah memiliki program untuk meningkatkan kinerja UKM. Demikian juga BI, melalui kewenangannya, sudah mendorong bank umum untuk memfasilitasi pembiayaan UMKM dan mematok harus mencapai 20 persen dari total penyaluran kredit masing-masing bank. Namun demikian, capaikan kinerja untuk pengembangan UKM masih belum memuaskan baik secara nasional maupun di tingkat daerah (diwakili kasus di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan). Penyaluran kredit atau pembiayaan UMKM sampai tahun 2017 juga masih agak jauh dari target 20 persen total kredit tersalur di tahun 2018.

Sesuai dengan judul buku bunga rampai ini, *Pengembangan Kewirausahaan untuk Pemberdayaan UKM Daerah,* dalam setiap bagian buku ini dibahas alternatif kebijakan pemberdayaan UKM di daerah. Beberapa butir penting untuk pemberdayaan UKM yang

diharapkan pemda dapat mengambil peran adalah (1) pemberdayaan para pelaku wirausaha, terutama bagi pemula, melalui kegiatan pelatihan, magang, dan inkubasi bisnis UMKM untuk meningkatkan kualitas pengelolaan bisnisnya; (2) penyederhanaan perizinan usaha serta peraturan daerah terkait pengembangan bisnis UMKM untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi; (3) dukungan bagi peningkatan akses dan ketersediaan sumber pembiayaan dengan biaya transaksi pinjaman yang lebih murah terutama bagi wirausaha pemula untuk dapat memulai usahanya; (4) dukungan riset untuk pengembangan produk melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi proses produksi dan daya saing produk; dan (5) fasilitasi untuk meningkatkan akses pasar, baik domestik maupun internasional bagi produk UKM, seperti melalui ajang promosi dan pameran.

Apabila beberapa alternatif kebijakan seperti disebutkan di atas dapat diimplementasikan oleh sebagian besar pemda kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, dapat diharapkan akan terjadi percepatan peningkatan kuantitas pelaku wirausaha UKM dan perbaikan kualitas kewirausahaan UKM di setiap daerah yang sangat besar. Andaikan hal ini berjadi, Indonesia akan menjadi salah satu negara yang mempunyai kemampuan bersaing yang tinggi di pasar global, mengingat jumlah penduduk negara ini yang cukup besar yang berarti jumlah wirausahawan UKM juga lebih banyak dibandingkan dengan negara lingkup ASEAN lainnya. Dengan posisi seperti ini, UMKM dapat menjadi salah satu motor penggerak perekonomian nasional.

Dengan catatan di atas, diharapkan para pembaca dapat terilhami setelah membaca buku ini, terutama para pengambil kebijakan dan para wirausaha UMKM, tergerak untuk memulai upaya mendorong percepatan pengembagan UMKM dari sisi kuantitas dan kualitasnya. Semoga.

Editor

INDEKS

A

aplikasi, 73
anggaran, 115, 117, 118, 121, 122
angel investor, 24, 25
akses, 2, 5, 6, 27, 28,33, 38, 45, 46, 47, 49, 60, 61, 66, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 84, 94, 130

B

baki debet, 70, 71
bankable, 62, 65, 66, 74
Bank Indonesia,
  peran, 5, 55, 57, 58, 61, 72
  peraturan, 6, 57, 71
bank umum, 5, 6, 57, 59, 63, 68, 69, 78, 129
Bantul, 7, 8, 43, 44, 105, 107, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 129
barang, 1, 4, 7, 22, 36, 37, 59, 62, 85, 86, 87, 90, 93, 97
bisnis sosial, 13, 16, 17, 18
bottom up, 48, 115, 124

C

crowdfunding, 25, 26, 28
crowdlending, 26, 28

D

demand side policy, 62
disinsentif, 6, 57, 69, 72, 76, 78
daya saing, 11, 42, 43, 46, 60, 73, 83, 89, 130
digital, 11, 75
donatur, 18, 25

E

ekonomi,
  kebijakan, 42
  kinerja, 88
  kondisi, 97, 105
  pembangunan, 5, 14, 22, 37, 42, 85, 86, 87, 88, 99, 100
  perkembangan, 1
  pertumbuhan, 1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 42, 43, 50, 85, 86, 87, 88, 89, 99, 105, 106, 129
ekspor, 56, 74, 86, 115, 116, 117

F

faktor,
  biaya, 100
  inovasi, 3, 16
  ketidakpastian, 119
  kontekstual, 15, 16

produksi, 4, 36, 37, 39
feasible, 65
financial technology (*fintech*), 74, 77

G

global,
ekonomi, 31, 43, 83
organisasi, 41
pangan, 43
pasar, 1, 2, 31, 130
standar, 27, 47

H

hibah, 18, 64

I

identifikasi, 41, 93, 95, 97, 107
income, 11
inflasi, 61, 73, 74
informasi, 6, 34, 49, 68, 73, 76, 84, 129
informal, 27, 38, 49
inisiasi, 13
inkubator, 77, 78
inovasi, 3, 5, 16, 19, 21, 22, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 60, 73, 77, 78, 85, 88, 89, 94, 97, 99, 130
inovator, 33, 35, 37, 39, 87

J

jasa, 1, 4, 7, 20, 22, 27, 31, 32, 36, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 62, 73, 85, 86, 87, 90, 92, 95, 97, 100, 106, 108, 109

K

kajian, 40
kebijakan pengembangan UMKM, 62, 83
kemiskinan, 1, 3, 12, 13, 21, 28, 44, 55, 86, 129
kesejahteraan, 3, 14, 22, 28, 34, 44, 83, 88, 100
kewirausahaan,
bidang, 23
bisnis, 2, 5, 38
definisi, 3, 14, 19
inkubasi, 5
kebijakan, 38
kegiatan, 3, 21, 28, 37
kelompok, 22
kemampuan, 2, 36, 42
konsep, 15, 85
model, 21
orientasi, 76
pemasaran, 7, 84
pendidikan, 37, 38
pendirian, 17
pengembangan, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 20, 22, 33, 43, 44, 48, 49, 50, 60, 83, 84, 129
peran, 2, 11, 13, 14, 28, 37, 41, 85, 88
struktur, 15
kewirausahaan sosial, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28
klaster, 74
konsumen, 7, 11, 18, 84, 90, 93, 94, 95, 100, 108, 109, 118, 120

kondusif, 28, 33, 40, 43, 47, 51, 86, 106, 124
kreasi, 22, 31
kreativitas, 5, 11, 27, 31, 38, 39
lembaga keuangan, 24, 38, 41, 46, 49, 59, 61, 62, 63, 77

M

makro, 32, 33
manajemen, 37, 46, 76, 77, 78, 113, 119, 123, 124
mandiri, 18, 33, 36, 39, 44, 45, 123
manajerial, 44, 89
mentor, 27, 47
modal, 2, 22, 23, 24, 34, 37, 46, 49, 50, 51, 59, 60, 64, 70, 88, 107, 109, 111, 112, 113, 118, 119, 121, 123, 124
modal ventura, 24
motivasi, 17, 37, 44, 109

N

network, 25, 41
nirlaba, 17, 20
non performance loan (NPL), 66, 70, 71

O

operasional, 96, 98, 108, 109, 110, 111, 113, 122
otonomi, 34, 43, 48

P

pasar, 1, 2, 5, 6, 7, 16, 26, 27, 31, 38, 39, 41, 45, 46, 47, 49, 61, 73, 74, 76, 84, 85, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 106, 107, 108, 109, 112, 116, 120, 124, 130
pembiayaan UMKM, 58, 59, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 72, 76, 129
penawaran, 62, 63
penelitian, 41, 42, 62, 72, 88, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 118, 120
pengembangan UMKM, 56, 60, 62, 64, 68, 73, 77, 78
perbankan, 24, 27, 33, 38, 44, 46, 56, 57, 60, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 123, 124
permintaan, 46, 62, 87, 96, 109, 120, 124
pertumbuhan ekonomi, 1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 42, 50, 85, 86, 87, 88, 89, 99, 105, 106, 129
policy, 41, 62, 63, 108
produk domestik bruto (PDB), 55, 87
produktivitas, 42, 73, 85, 87, 88, 89

R

rasio kredit, 63, 69, 71, 72
regulasi, 4, 5, 28, 32, 33, 45, 47, 50, 67, 106

S

suku bunga, 27, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 123, 124
supply side policy, 63
sosial,
- bisnis, 13, 16, 17, 18
- dampak, 25
- gerakan, 16, 26
- inovasi, 19, 21
- interaksi, 31
- keadaan, 3
- keadilan, 3, 28
- kewirausahaan, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28
- kondisi, 3, 105
- konsep, 92
- konteks, 99
- lingkungan, 15
- manfaat, 19
- masalah, 3, 13, 14, 16, 19, 20
- modal, 19, 22
- nilai, 3, 16, 19, 22
- program, 25
- tanggung jawab, 16

startup, 23, 24, 25, 26, 38, 45, 76
strategi pemasaran, 2, 7, 8, 83, 84, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101
subsidi, 34, 38, 51, 60, 65, 66, 67, 123, 124

T

tenaga kerja, 16, 17, 36, 40, 43, 56, 59, 88, 89, 100, 115, 117
tatakelola, 34

U

UMKM, 5, 6, 43, 45, 46, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 129, 130
utility, 59

W

wirausahawan, 1, 2, 4, 5, 7, 11, 12, 17, 23, 26, 27, 28, 31, 32, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 50, 51, 75, 83, 92, 97, 99, 101, 117, 118, 119, 123, 130
workshop, 24, 43, 44
World Bank, 60

TENTANG EDITOR

Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, MS., lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat pada bulan Juli 1954 adalah Peneliti Ahli Utama pada Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian sejak tahun 1998 dan dikukuhkan sebagai Profesor Riset pada tahun 2007. Suryana menyelesaikan pendidikan S-1 dan S-2 di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan S-3 (Ph.D in economics) dari North Caroline State University, Amerika Serikat tahun 1986. Sejak awal bekerja, Suryana berkarir di Kementerian Pertanian, dalam periode 1994-2000 menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Investasi dan AMDAL, Kepala Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, dan Kepala Biro Perencanaan; dan sebagai pejabat eselon I Kepala Badan Urusan/ Bimas Ketahanan Pangan (2000-2004), Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (2004-2008) dan Kepala Badan Ketahanan Pangan (2008-2014). Suryana dipercaya sebagai Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II (1999-2004) Komisaris/Komisaris Utama PT Pupuk Kujang (2004-2011), dan Komisaris PT Pupuk Indonesia (2011-2016).

Di bidang legislasi, Suryana mendapat tugas sebagai Ketua Kelompok Kerja Pemerintah dalam tiga pembahasan Undang-Undang, yaitu UU Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pengesahan International Treaty on Plan Genetic Resources for Food and Agriculture, UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dan UU Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Di kancah internasional, Suryana beberapa kali memimpin delegasi Republik Indonesia dalam berbagai pertemuan ASEAN, APEC, serta FAO, dan terpilih menjadi

anggota Board of Trustees-International Rice Reserach Institute (IRRI) dua periode (2008-2013). Suryana telah mempublikasikan lebih dari 100 artikel ilmiah di bidang kebijakan pembangunan pertanian, agribisnis, serta ketahanan pangan dan gizi dan menjadi editor lebih dari 12 buku.

TENTANG PENULIS

Dewi Wuryandani, menyelesaikan studi S-1 pada jurusan Teknik Kimia–Fakultas Teknologi Industri di Universitas UPN "Veteran" Yogyakarta dan melanjutkan pendidikan Pascasarjana pada jurusan Keuangan Manajemen Ekonomi-Magister Ekonomi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai tahun 2009 sebagai Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik di Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). Beberapa topik penelitian tentang ekonomi dan kebijakan publik telah dilakukan penulis seperti: Pembangunan Daerah Tertinggal (2011), Sistem dan Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2011), Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Volume Perdagangan Non Migas (2012), Industri Kreatif (2012), Kawasan Pariwisata Khusus (2013), Membangun Iklim Investasi dalam Menggerakkan UMKM (2013) serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah Otonomi Baru (2014). Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Daya Saing Melalui Perdagangan Internasional (2015), Pemerintah Dalam meningkatkan Daya Saing Produk Pangan Lokal (2015), Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah dalam Mendukung Perekonomian Nasional (2016), Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode Keanggotaan 2014-2019 (2016) dan Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kewirausahaan dalam Menghadapi Persaingan Bebas (2017). Teknologi Disruptif: Tantangan dan Peluang dalam Mendorong Kewirausahaan (2018). Selain itu penulis juga pernah terlibat dalam asistensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang seperti RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro, RUU

tentang Perdagangan, RUU tentang Paten dan saat ini sedang terlibat dalam pembahasan RUU tentang Kewirausahaan Nasional. Adapun karya tulis yang pernah diterbitkan beberapa di antaranya adalah Lembaga Keuangan Mikro dalam Menunjang Kemandirian Ekonomi Bangsa, Kebijakan Strategis Pengembangan UMKM sebagai Penggerak Ekonomi Nasional, Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Daya Saing Melalui Perdagangan Internasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dewi.wuryandani@gmail.com atau dewi.wuryandani@dpr.go.id

Mandala Harefa, adalah peneliti Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, yang merupakan alumnus Program Pascasarjana, Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik-Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Penulis pada saat ini menjabat sebagai Peneliti Utama kepakaran Kebijakan Ekonomi Publik bidang desentralisasi dan ekonomi regional yang bertugas memberi dukungan kegiatan DPR dalam membuat kajian, analisa kebijakan, proses RUU menjadi undang-undang dan mempersiapkan makalah bagi Pimpinan, alat kelengkapan dewan dan apara anggota DPR RI. Sebagai peneliti telah melakukan berbagai penelitian lapangan dan telah diterbitkan di jurnal ilmiah dan dalam bentuk buku yang topiknya berkaitan dengan permasalahan terkait kebijakan publik sesuai dengan fungsi kedewanan antara lain keuangan negara dan daerah, ekonomi regional dan topik lainnya terkait dengan ekonomi publik BUMN dan UMKM yang telah diterbitkan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR dan Balai Pustaka serta penerbit lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui email: manhar@dpr.go.id

Hilma Meilani, S.T., MBA., adalah Peneliti Muda bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Pendidikan S-1 Teknik Kimia di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, dan pendidikan S-2 Finance di Magister

Manajemen Universitas Gadjah Mada. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai tahun 2009, dan saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda dengan kepakaran Kebijakan Ekonomi. Penulis pernah ditugaskan dalam pendampingan pembahasan RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak, RUU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, RUU Sistem Resi Gudang, dan RUU Minyak dan Gas Bumi. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui buku, antara lain: Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Sebelum dan Setelah Implementasi UU No. 28 Tahun 2009 (2017), Rasio Efektivitas dan Kontribusi PAD terhadap Belanja dan Investasi Daerah (2016), Peran Kebijakan Persaingan Usaha untuk Meningkatkan Efisiensi menghadapi ASEAN Economic Community (2015), Analisis Kemampuan Keuangan Daerah (2014), Desentralisasi Fiskal dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (2013). Beberapa topik penelitian tentang ekonomi dan kebijakan publik yang telah dilakukan antara lain: Teknologi Disruptif (2018), Kewirausahaan (2017), Pajak Daerah (2016), Investasi (2015), Persaingan Usaha (2014), dan Dana Perimbangan (2013). Penulis dapat dihubungi melalui email: hilma.meilani@dpr.go.id.

Dewi Restu Mangeswuri, lahir di Klaten, 6 Mei 1982. Menyelesaikan studi Sarjana dan Magister di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta Jurusan Akuntansi. Jabatan saat ini adalah Peneliti pada Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Pernah ditugaskan sebagai Tim Pemantauan Pelaksanaan UU di DPR RI untuk memantau UU tentang Perindustrian dan UU tentang Undian, serta bersama dengan Tim Pengawasan Internal dan BURT menyusun draft Mekanisme Pengawasan di DPR RI. KTI yang pernah dipublikasikan terkait kepakaran yaitu: Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah dan Efektivitas Pengelolaannya (Buku Tim, 2017), Kebijakan Pembiayaan Perumahan Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) (Jurnal, 2016), Peran

Institusi Perizinan terhadap Peningkatan Iklim Investasi (Buku Tim, 2016), Peran Lembaga Pengawas dalam Persaingan Usaha (Buku Tim, 2015), Akuntabilitas Pengelolaan Dana Perimbangan Daerah (Studi Kasus: Kabupaten Banjar dan Kota Denpasar) (Buku Tim, 2014), Perkembangan Ketersediaan dan Kebutuhan Perumahan di Batam (Jurnal, 2012). Tugas terkait penyusunan Undang-Undang adalah tergabung dalam tim kerja penyusunan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Saat ini masih menyelesaikan penyusunan Rancangan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Kewirausahaan Nasional. Penulis dapat dihubungi melalui email: mangeswuri@yahoo.com

Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, adalah Peneliti Muda bidang kebijakan publik di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, lahir di Yogyakarta, 18 Mei 1981. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 di Teknik Kimia, Institut Teknologi Bandung pada Tahun 2004 dan menyelesaikan pendidikan S-2 di Magister Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada pada Tahun 2009. Penulis menaruh minat pada permasalahan pengelolaan energi dan sumber daya alam, perindustrian, Usaha Kecil Menengah dan Koperasi, serta pengelolaan Badan Usaha Milik Negara. Beberapa publikasi yang pernah diterbitkan antara lain: Pengendalian BUMN Sektor Telekomunikasi Pasca Privatisasi (2015), Kebijakan Peningkatan Kinerja Industri Manufaktur (2014), Kebijakan Menghadapi ASEAN Open Sky (2013), dan Kebijakan Sisi Hulu dan Hilir Industri Gas Bumi. Saat ini penulis juga tengah aktif dalam penelitian terkait Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan dan Pemodalan dalam Usaha Koperasi. Selain itu penulis tengah tergabung dalam tim penyusun draft naskah akademik dan rancangan undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara, serta revisi rancangan undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Penulis dapat dihubungi melalui email: sahat.silalahi81@gmail.com.